# Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kota Gorontalo

## Indriyanti Gala, Idris Yanto Niode, Syamsul B. Biki

12.3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Info Artikel		ABSTRACT
HistoriArtikel: Dikirim 20 Agust Jul, 2025 Direvisi 26 Sept, 2025 Diterima 14 Okt, 2025		This study aims to identify the implementation of the Personnel Information System (SIMPEG) at the Agency for Personnel, Education, and Training of Gorontalo City, as well as the supporting and inhibiting factors in its application. This research uses a qualitative approach with primary and secondary data collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of SIMPEG has generally been running well, as indicated by adequate infrastructure readiness and effective implementation in terms of input, process, and output aspects. Four performance indicators, human resource quality, budget, time, and infrastructure, are considered good. SIMPEG has made personnel data management easier. The inhibiting factors include forgotten passwords, errors in selecting positions, and system errors when printing KGB decrees. The supporting factors are infrastructure readiness and support from the central authority.
Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		
		Copyright © 2025 Author   This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 International License

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Gorontalo, serta faktorfaktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG secara keseluruhan berjalan baik, terlihat dari kesiapan infrastruktur dan pelaksanaan yang mencakup aspek input, proses, dan output. Empat indikator kinerja yang dinilai baik yaitu kualitas SDM, anggaran, waktu, dan infrastruktur. SIMPEG mempermudah pengelolaan data kepegawaian. Adapun faktor penghambat meliputi lupa password, kesalahan dalam memilih jabatan, serta error saat mencetak SK KGB. Faktor pendukungnya adalah kesiapan infrastruktur dan dukungan dari pusat.

Korespondensi: indriyanti.gala@gmail.com

# 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka peluang luas bagi organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan informasi secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dalam pengelolaan data dapat memangkas rantai proses kerja dengan menghapus tahapan-tahapan yang tidak memberikan nilai tambah. Kondisi ini menjadi dasar bagi organisasi modern untuk menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berfungsi mengintegrasikan berbagai proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan.

Dalam konteks manajemen kepegawaian, pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) bertujuan untuk menyediakan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terstruktur dengan baik dan mudah diakses sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang akurat, cepat, dan terpadu sangat penting agar keputusan dalam bidang kepegawaian dapat diambil secara efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, SIMPEG diharapkan dapat memperbaiki kinerja aparatur sipil negara sekaligus mendukung proses pengembangan pegawai (Musanef, 2016).

SIMPEG merupakan bentuk inovasi dalam manajemen kepegawaian yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transformasi dari sistem administrasi konvensional berbasis fisik menuju sistem administrasi digital atau pemerintahan elektronik. Secara komprehensif, SIMPEG mencakup perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu sumber daya manusia dalam mengolah dan mengelola data kepegawaian. Melalui penerapan SIMPEG, berbagai permasalahan terkait pendataan PNS yang selama ini kurang tertata diharapkan dapat diminimalkan, sehingga pengelolaan data pegawai menjadi lebih transparan dan akurat (Musanef, 2016).

Salah satu instansi pemerintah yang telah menerapkan SIMPEG adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gorontalo, dan dipimpin oleh pejabat eselon IIb sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKPP Kota Gorontalo.

Penerapan SIMPEG di BKPP Kota Gorontalo dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem yang mampu menyediakan data kepegawaian yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Selain itu, perkembangan pesat teknologi informasi serta meningkatnya tuntutan terhadap efisiensi administrasi mendorong perlunya sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Faktor sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek penting dalam implementasi SIMPEG, mengingat kemampuan SDM dalam mengelola teknologi informasi akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan sistem tersebut.

Hasil wawancara dengan salah satu pegawai subbagian kepegawaian menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG di BKPP Kota Gorontalo dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya pengelolaan data pegawai yang cepat dan tepat, serta kesulitan yang dihadapi dalam sistem manual sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis, seperti lupa kata sandi, kesalahan dalam memilih jabatan pada satuan kerja, serta gangguan sistem saat mencetak Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (SK KGB).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun implementasi SIMPEG telah berjalan, masih diperlukan upaya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sistem ini berfungsi optimal, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung keberhasilannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Gorontalo."

# 2. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun kelompok yang diamati. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan BKPP Kota Gorontalo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui secara mendalam tentang penerapan SIMPEG, seperti pejabat struktural dan staf yang terlibat dalam pengelolaan sistem tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan, arsip kepegawaian, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan SIMPEG di BKPP Kota Gorontalo. Wawancara dilakukan secara mendalam guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan, kendala, dan faktor pendukung implementasi SIMPEG. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil observasi dan wawancara.

# 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Sebagai instansi yang menjalankan fungsi manajemen kepegawaian, BKPP memiliki tanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan, serta pelatihan aparatur. Dalam menjalankan tugas tersebut, BKPP membutuhkan sistem yang mampu mengelola data pegawai secara cepat, tepat, dan akurat untuk mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan sistem informasi terpadu yang digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan data pegawai mulai dari tahap input, pemrosesan, hingga menghasilkan output berupa informasi kepegawaian yang akurat. Sistem ini mengintegrasikan unsur tata kerja, prosedur, pendataan pegawai, pengolahan data, teknologi informasi, dan sumber daya manusia agar tercipta efektivitas dalam administrasi kepegawaian.

Penerapan SIMPEG di BKPP Kota Gorontalo dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan terhadap sistem informasi pegawai yang cepat, tepat, dan terintegrasi, serta adanya berbagai kendala dalam pengelolaan data secara manual sebelumnya. SIMPEG diimplementasikan melalui unit kerja Biro Kepegawaian yang berfungsi sebagai pengelola utama data aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aplikasi SIMPEG di BKPP Kota Gorontalo telah berbasis online, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efisien dan dapat diakses secara real time. Penerapan SIMPEG juga terbukti mempermudah proses pengumpulan, pendokumentasian, dan pemanfaatan data pegawai. Data yang dihasilkan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berbagai aspek manajemen kepegawaian, seperti promosi, mutasi, dan pengembangan kompetensi pegawai. Dengan demikian, ketepatan data pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas keputusan yang diambil oleh pimpinan.

Dalam pelaksanaan SIMPEG, masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang berpengaruh terhadap optimalisasi sistem. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1. Lupa kata sandi (password) Beberapa pegawai mengalami kesulitan mengakses sistem karena lupa password. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan mencatat password secara sistematis atau melakukan reset melalui administrator.
- 2. Kesalahan dalam memilih jabatan pada satuan kerja Kesalahan input data jabatan sering terjadi akibat kurangnya ketelitian pegawai. Solusi yang dilakukan yaitu pemeriksaan ulang data sebelum proses validasi oleh operator.
- 3. Error saat mencetak Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (SK KGB) Gangguan teknis seperti error pada sistem saat mencetak SK KGB masih kerap terjadi. Untuk mengatasi hal ini, operator berkoordinasi langsung dengan operator pusat guna mendapatkan solusi teknis yang tepat.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi serta penguatan aspek teknis agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Selain faktor penghambat, terdapat pula faktor pendukung yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi SIMPEG di BKPP Kota Gorontalo. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- 1. Kesiapan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet, perangkat komputer, dan server yang memadai untuk mendukung operasional sistem.
- 2. Dukungan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk bimbingan teknis, pembaruan sistem, maupun pendampingan teknis dalam penyelesaian kendala operasional.

Kedua faktor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan SIMPEG, sehingga sistem dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian melalui pengelolaan data yang cepat, tepat, dan akurat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Implementasi SIMPEG di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut nampak pada kesiapan infrastruktur yang digunakan guna mendukung implementasi SIMPEG. Pelaksanaan SIMPEG dapat dilihat pada aspek input, proses, dan output dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Dari enam indikator dikategorikan pelaksanaannya sudah baik. Empat indikator tersebut adalah kualitas SDM, anggaran, waktu, dan infrastruktur. Dengan adanya SIMPEG ini sangat mempermudah pegawai biro kepegawaian dalam mengelola data.
- 2. Faktor penghambat berdasarkan hasil penelitian terdapat faktor penghambat SIMPEG yaitu lupa password SIMPEG, salah memilih jabatan pada satuan kerja, error ketika mencetak SK KGB. Faktor pendukung SIMPEG Biro Kepegawaian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Gorontalo berdasarkan hasil penelitian yaitu kesiapan infrastruktur dan dukungan dari pusat.

## REFERENSI

- [1] Abdurrahman, M., & Muhidin, S. A. (2011). Panduan praktis memahami penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia.
- [2] Abi, A., & Setiawan, J. (2016). Metode penelitian kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- [3] Abrar, H. (2011). Manajemen proyek. Yogyakarta: Andi.
- [4] Ahmadi, A., & Narbuko, C. (2009). Metode penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- [5] Handayaningrat, S. (2011). Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung.
- [6] Handoko, T. H. (2001). Manajemen personalia dan sumber daya manusia. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- [7] Jogiyanto. (2009). Sistem informasi manajemen. Yogyakarta: Andi.
- [8] Kristanto, A. (2004). Analisa sistem informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Lambi, M. (2023). Sistem informasi manajemen: AI as the future management information system. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- [10] Laut, I. M. M. J. (2020). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Teori, penerapan, dan riset nyata. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- [11] Lestari, P. (2007). Implementasi sistem manajemen informasi manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri Karangpucung Kabupaten Cilacap. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan, 5(1).
- [12] Madjid, P. I. (2011). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Depok.
- [13] Mulyadi. (2015). Implementasi kebijakan. Jakarta: Balai Pustaka.
- [14] Musanef. (1996). Manajemen kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- [15] Nugroho, A. S. (2018). Sistem informasi manajemen: Tinjauan praktisi teknologi informasi. Yogyakarta: Teknosain.
- [16] O'Brien, J. A. (2010). Management system informasi. New York: McGraw-Hill.
- [17] Patma, T. S., dkk. (2018). Sistem informasi manajemen: Guna mendukung keputusan. Malang: Polinema Press.
- [18] Pramono, J. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Surakarta: UNISRI Press.
- [19] Prastowo, A. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- [20] Purnama, C. (2016). Sistem informasi manajemen. Mojokerto: Insan Global.
- [21] Ridwan, M., dkk. (2021). Sistem informasi manajemen. Bandung: Widina Bhakti.
- [22] Rivai, V., & Sagala, E. J. (2005). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik. Jakarta: Rajawali Press.
- [23] Sedarmayanti. (2007). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [24] Sedarmayanti. (2017). Perencanaan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan produktivitas kerja. Bandung: PT Refika Aditama.
- [25] Semiawan, C. R. (2010). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- [26] Setyawati, C. Y., dkk. (2022). Sistem informasi manajemen: Mengelola perusahaan digital. Bandung: Media Sains Indonesia.
- [27] Situmorang, S. H. (2010). Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis. Medan: USU Press.
- [28] Siyanto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- [29] Sugiono. (2008). Metode penelitian bisnis. Bandung: Alfabeta.
- [30] Sugiyono. (2013). Metode penelitian kombinasi: Mixed method. Bandung: Alfabeta.
- [31] Sutarbi, T. (2005). Sistem informasi manajemen. Makassar: Andi Offset.
- [32] Sutarman, A. (2012). Pengantar teknologi informasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- [33] Veithzal, R., & Sagala, E. J. (2005). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik. Jakarta: Rajawali Press.
- [34] Winardi. (2004). Manajemen perilaku organisasi. Jakarta: Media Group.
- [35] Zulaikah, D. N. (2019). Implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) di PDAM Kota Malang. Malang.